

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia merupakan bentuk tanggungjawab kinerja pemerintah kepada masyarakat yang menjadi suatu tuntutan umum. Tuntutan masyarakat yang meningkat terhadap penyelenggaraan pemerintahan telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Demi mewujudkan tata kelola yang baik, pemerintah daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Lestari dan Dewi, 2020)

Menurut Undang-Undang Nomor 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan yang berkualitas dapat dilihat dari karakteristik laporan keuangan yang dapat dibandingkan, dapat dipahami, andal dan relevan. Laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan media yang digunakan oleh entitas/satuan khusus pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangan kepada pihak yang berkepentingan (publik) (Hardyansyah, 2016). Entitas pemerintah daerah salah satu tugasnya mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada pemerintah pusat dengan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun. Laporan keuangan pemerintah yang belum memenuhi standar akuntansi dan jika masih ditemukan penyimpangan-penyimpangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menyebabkan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Listiani, 2018).

Peraturan Bupati Jember Nomor 57 Tahun 2016 mengatakan bahwa Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jember merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Adanya Peraturan Bupati tersebut berarti bahwa

BAPPEDA Kabupaten Jember memiliki kewajiban untuk melaksanakan perencanaan dan pembangunan daerah dalam mengelola keuangan daerah agar lebih baik. Akan tetapi, pada tahun 2020 Kabupaten Jember memperoleh opini tidak wajar dari hasil audit Badan Pengawas Keuangan (BPK). Beberapa point material yang menyebabkan BPK memberi opini tidak wajar yaitu pada penyajian nilai perolehan akumulasi penyusutan dan beban penyusutan atas aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan masing-masing sebesar Rp. 3.470,53 miliar, Rp. 2.007,36 miliar dan Rp. 141,46 miliar. Aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan berupa rehabilitasi, renovasi, dan pemeliharaan yang belum dan tidak didistribusikan secara tepat ke aset induknya. Hal ini mempengaruhi akurasi perhitungan beban dan akumulasi penyusutan laporan (Kompas.com; 1 Juni 2021). Kualitas laporan keuangan dan nilai informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah akan menimbulkan pertanyaan apakah laporan keuangan pemerintah selama ini sudah memenuhi kriteria.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa kompetensi tenaga kerja atau sumber daya manusia merupakan karakter dasar, maka keahlian-keahlian yang unggul dari perseorangan yakni keahlian, pengetahuan, dan perilaku digunakan dalam rangka mencapai kinerja yang terbaik untuk melaksanakan pekerjaan atau kewajiban. Kompetensi sumber daya manusia dibutuhkan dalam rangka mendukung terselenggaranya pengelolaan keuangan pemerintah, penyusunan laporan keuangan yang baik, transparan dan terhindar dari kesalahan pencatatan maupun perhitungan (Dewi & Dewi, 2020). Oleh karena itu untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam menghasilkan laporan keuangan.

Faktor pendukung lain untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah sistem informasi akuntansi. Menurut Romney dan Steinbart (2014), sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengelola data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Adanya sistem informasi akuntansi sangat membantu dalam

pemenuhan dan penyediaan informasi yang bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak berkepentingan, serta memenuhi tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah daerah (Chairina & Wehartaty, 2019)

Hal lain yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu sistem pengendalian internal. Suatu proses yang dipengaruhi oleh kepala daerah, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektifitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku merupakan pengertian dari pengendalian internal menurut COSO. Menurut Putri dkk. (2020) sistem pengendalian internal yang dapat digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan operasional, membantu dalam pengelolaan keuangan. Tingginya kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari penerapan sistem pengendalian internal, dan ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internal yang diterapkan organisasi pemerintah daerah. Kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal merupakan faktor yang mempengaruhi kriteria laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Utama, 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dkk. (2020) menyatakan bahwa secara simultan variabel sistem pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, secara parsial sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, secara parsial sistem informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Tawaqal, I dan Suparno (2017) menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut penelitian Kiranayanti, I. A. E dan Erawati, N. M. A (2016) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran penjelasan bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kualitas laporan keuangan yang ada di BAPPEDA Jember dalam melaksanakan tugas dan mengoordinasi pengumpulan, pengisian, evaluasi data dan informasi serta penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah berdasarkan faktor kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jember. Oleh karena itu penelitian ini menganalisis “ **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember?
2. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
3. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
4. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi mengenai pentingnya kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi yang berhubungan dengan penelitian selanjutnya.